

Pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi

Wanti Oktaviani*; Zulgani; Rosmeli

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*E-mail korespondensi: wantioktaviani@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze: 1) inequality of development in Jambi Province; 3) the effect of general allocation funds (DAU), special allocation funds (DAK), and profit sharing funds (DBH) on inequality in development in Jambi Province. The data used are secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics of Jambi Province. The data analysis tool uses Williams Index, and path analysis. The results of the study found that 1) The average Williamson Index value in Jambi Province during the period 2001-2016 is 0.392743, which means that there is a high inequality. 2) Simultaneously DAU, DAK, and DBH have a significant effect on inequality. together DAU, DAK, and DBH are able to explain inequality by 80.00%, while the remaining 20.00% is explained by other variables not found in this study. Partially the variables that significantly influence inequality are DBH while DAU and DAK have no significant effect.

Keywords: *General allocation funds, special allocation funds, revenue sharing funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi; (2) pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Alat analisis data menggunakan Indeks Williamson, dan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) rata-rata nilai Indeks Williamson di Provinsi Jambi selama periode 2001-2016 adalah 0,392743 yang artinya terjadi ketidakmerataan yang tinggi. 2) Secara simultan DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. secara bersama-sama DAU, DAK, dan DBH mampu menjelaskan ketimpangan sebesar 80,00%, sedangkan sisanya sebesar 20,00% dijelaskan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan adalah DBH sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Dana bagi hasil.

PENDAHULUAN

Pembangunan menyangkut banyak aspek selain aspek ekonomi. Pembangunan ekonomi secara spasial atau kewilayahan merupakan aspek yang dapat menentukan apakah suatu pembangunan berhasil atau tidak, terutama menyangkut aspek

pemerataan. Agar aspek pemerataan berjalan dan pembangunan ekonomi mencapai sasaran yaitu : (1) meningkatkan pendapatan; (2) pemerataan distribusi pendapatan; (3) menurunnya jumlah penduduk miskin; dan (4) menurunnya tingkat pengangguran. Karena itu pembangunan dari aspek kewilayahan terutama pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara nasional (Amir, 2007).

Pada awal pembangunan ekonomi suatu daerah, ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak dapat dihindari, karena pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang diukur dari kenaikan PDRB untuk setiap tahun. Pada dasarnya peningkatan PDRB dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki daerah yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Secara lebih rinci diuraikan dalam pemilikan faktor produksi (modal, tenaga kerja, tanah, dan skill). Semakin besar faktor produksi tersebut, akan semakin besar output yang diperoleh yang pada gilirannya akan meningkatkan PDRB (Tan, 2013).

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal dan Otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan pemberian kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan hasil dan pembangunan daerahnya masing-masing. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah serta mendorong dan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah demi kesejahteraan masyarakat (Elly, 2016).

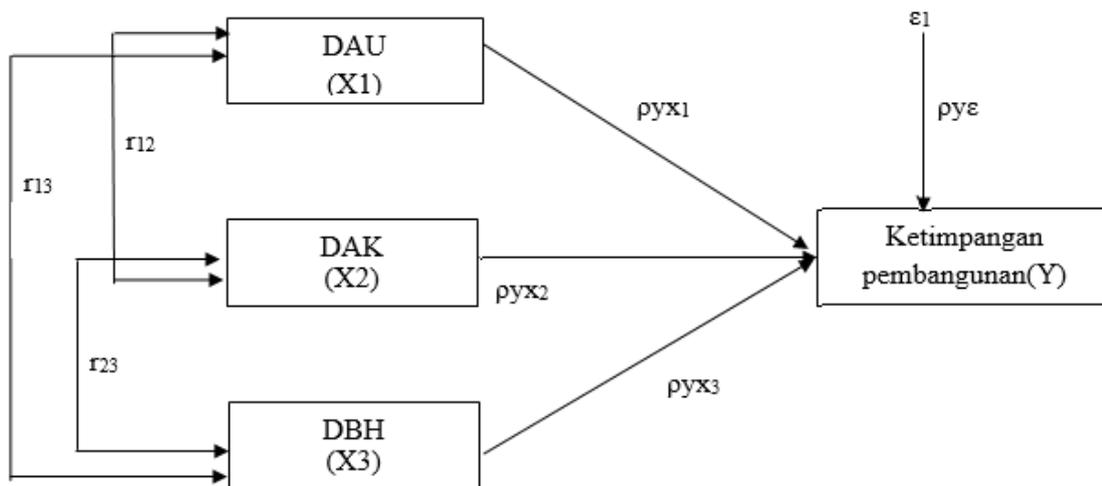
Di wilayah Sumatera, terdapat indikasi makin membesarnya ketimpangan pembangunan antar provinsi. Pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dan Sumatera Utara akan melaju dengan cepat, sementara provinsi lainnya seperti Bengkulu akan tertinggal. Salah satu penyebabnya diperkirakan adalah perbedaan dalam jumlah investasi dan tenaga kerja. Daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah tumbuh lebih cepat, dan daerah miskin sumber daya akan tertinggal. Hal inilah yang membawa konsekuensi kepada Riau dan Sumut dalam melihat ketimpangan pembangunan dengan anggapan ketiga provinsi tersebut merupakan penyebab ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera (Tan, 2013).

Tujuan dari penelitian untuk menganalisis : (1) ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi; dan (2) pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Provinsi Jambi, runtut waktu (*times series*) selama 16 tahun yakni dari tahun 2001-2016. Data bersumber dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Indeks Williamson* dan *path analysis*.

Untuk menganalisis pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan digunakan alat *path analysis*. Berikut ini adalah diagram jalur yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 1. Analisis jalur (*path analysis*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan pembangunan antar kab/kota di Provinsi Jambi

Rata-rata nilai Indeks Williamson di Provinsi Jambi selama periode 2001-2016 adalah 0,392743 yang artinya terjadi ketidakmerataan yang tinggi. Secara terperinci, perkembangan Indeks Williamson Provinsi Jambi selama periode 2001 – 2016 diberikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil perhitungan indeks williamson di Provinsi Jambi

Tahun	Indeks Williamson
2001	0,360465588
2002	0,381296098
2003	0,383288089
2004	0,375796233
2005	0,378828768
2006	0,379937608
2007	0,378091152
2008	0,374504113
2009	0,376522814
2010	0,415840389
2011	0,415455421
2012	0,419844870
2013	0,417189933
2014	0,415640413
2015	0,408310146
2016	0,402871865
Rata-rata	0,392742719

Sumber :BPS, 2017(Data diolah)

Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan

Estimasi model pengaruh DAU, DAK dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan diberikan pada Tabel 3, 4 dan 5.

Tabel 3. Estimasi model ketimpangan pembangunan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.364	.006		63.630	.000
DAU	5.425E-9	.000	.084	.364	.722
DAK	2.112E-8	.000	.036	.263	.797
DBH	8.638E-8	.000	.819	3.640	.003

Tabel 4. ANOVA model ketimpangan pembangunan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.005	3	.002	15.955	.000 ^a
	Residual	.001	12	.000		
	Total	.006	15			

Tabel 5. Koefisien determinasi model ketimpangan pembangunan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.894 ^a	.800	.749	.00998

Dari perhitungan didapat nilai F_{hitung} sebesar 15,955, dengan tingkat signifikansi $0,000 < \alpha = 0,01$. Artinya secara simultan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,800. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mampu menjelaskan ketimpangan pembangunan sebesar 80 persen, sedangkan sisanya sebesar 20 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) didapat nilai t_{hitung} sebesar 0,364 dengan tingkat signifikansi $0,722 > \alpha = 0,1$. Artinya secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.

Pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) didapat nilai t_{hitung} sebesar 0,263 dengan tingkat signifikansi $0,797 > \alpha = 0,1$. Artinya secara parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.

Pada variabel Dana Bagi Hasil (DBH) didapat nilai t_{hitung} sebesar 3,640 dengan signifikansi $0,003 < \alpha = 0,01$. Artinya secara parsial Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.

Analisis korelasi

Untuk mencari hubungan langsung dan tidak langsung atau pengaruh variabel-variabel penelitian, terlebih dahulu dihitung matriks korelasi dari masing-masing variabel. Hasil perhitungan korelasi antar variabel diberikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Korelasi antar sub variabel

		IW	DAU	DAK	DBH
IW	Pearson Correlation	1	.760**	.161	.892**
	Sig. (2-tailed)		.001	.552	.000
	N	16	16	16	16
DAU	Pearson Correlation	.760**	1	.256	.814**
	Sig. (2-tailed)	.001		.338	.000
	N	16	16	16	16
DAK	Pearson Correlation	.161	.256	1	.127
	Sig. (2-tailed)	.552	.338		.640
	N	16	16	16	16
DBH	Pearson Correlation	.892**	.814**	.127	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.640	
	N	16	16	16	16

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

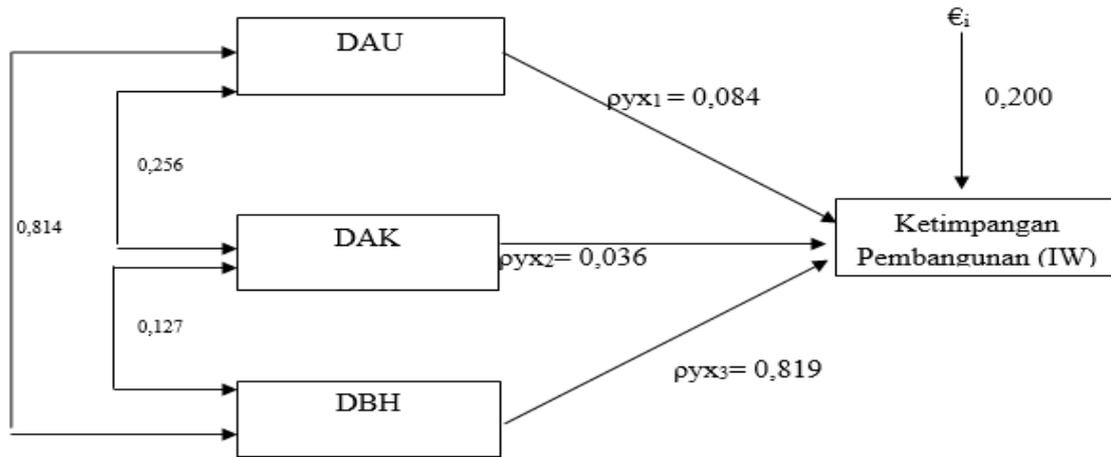
Berdasarkan hasil pengujian korelasi, maka dapat diketahui :

- Besarnya hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dihitung dengan koefisien korelasi atau ($r_{x_1x_2} = 0,256$), hal ini menunjukkan hubungan yang rendah dan positif antara DAU dengan DAK.
- Besarnya hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dihitung dengan koefisien korelasi atau ($r_{x_1x_3} = 0,814$), hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Dana Bagi Hasil (DBH).
- Besarnya hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan ketimpangan pembangunan (IW) yang dihitung dengan koefisien korelasi atau ($r_{yx_1} = 0,760$), hal ini menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan ketimpangan pembangunan (IW).
- Besarnya hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dihitung dengan koefisien korelasi atau ($r_{x_2x_3} = 0,127$), hal ini menunjukkan hubungan yang rendah dan positif antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Dana Bagi Hasil (DBH).
- Besarnya hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan ketimpangan pembangunan (IW) yang dihitung dengan koefisien korelasi atau ($r_{yx_2} = 0,161$), hal ini menunjukkan hubungan yang sangat rendah dan positif antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan ketimpangan pembangunan (IW).
- Besarnya hubungan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan ketimpangan pembangunan (IW) yang dihitung dengan koefisien korelasi atau ($r_{yx_3} = 0,892$), hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan ketimpangan pembangunan (IW).

Kerangka hubungan kausal

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diukur oleh ketimpangan pembangunan (IW) memiliki kontribusi yang positif dan tidak signifikan terhadap tinggi rendahnya ketimpangan pembangunan. Dengan demikian, tinggi rendahnya ketimpangan pembangunan dijelaskan oleh Dana Alokasi Umum. Besarnya kontribusi Dana Alokasi Umum yang secara langsung berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan sebesar

$(0,084)^2 = 0,71\%$. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diukur oleh ketimpangan pembangunan (IW) memiliki kontribusi yang positif dan tidak signifikan terhadap tinggi rendahnya ketimpangan pembangunan. Besarnya kontribusi Dana Alokasi Khusus yang secara langsung berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan sebesar $(0,036)^2 = 0,13\%$. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diukur oleh ketimpangan pembangunan (IW) memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya ketimpangan pembangunan. Besarnya kontribusi Dana Alokasi Khusus yang secara langsung berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan sebesar $(0,819)^2 = 67,08\%$.



Gambar 2. Jalur Hubungan Kausal Persamaan Struktural

Pengaruh langsung dari variabel eksogen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap ketimpangan pembangunan (IW), yang dapat terlihat pada tabel 7.

Tabel 7. Koefisien jalur, pengaruh langsung, pengaruh total dan pengaruh bersama DAU, DAK, dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh		Pengaruh Bersama ($R^2_{yx1x2x3}$)
		Langsung	Total	
X ₁	0.084	0.084	0,71%	-
X ₂	0.036	0.036	0,13%	-
X ₃	0.819	0.819	67,08%	-
ϵ	0,200	0,200	20,00%	-
X ₁ , X ₂ , dan X ₃	-	-	-	0,800 = 80,00%

Sumber : BPS Provinsi Jambi (diolah), 2017

Implikasi kebijakan

Dalam penelitian ini dana perimbangan dipresentasikan oleh total Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dari seluruh 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2001-2016. Sedangkan ketimpangan daerah dihitung berdasarkan formula Indeks Williamson yang meliputi PDRB, PDRB perkapita dan jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dalam kurun waktu tersebut.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara simultan DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Jambi selama periode 2001-2016. Jika realisasi dana perimbangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat di Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya maka hal ini akan

berdampak terhadap ketimpangan yang akan terjadi pada masing-masing daerah. Hal ini mengindikasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat. Jika dana perimbangan dikurangi hal ini mempengaruhi tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jambi.

Pada dasarnya, tidak ada teori yang melandasi hubungan antara dana perimbangan dan ketimpangan daerah secara langsung. Salah satu fungsi dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi tingkat ketimpangan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Disisi lain, jika melihat komposisi dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tersebut memberikan informasi bahwa rata-rata total realisasi dana perimbangan terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum yang dimana dipergunakan lebih banyak untuk membayar gaji pegawai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan seluruh daerah khususnya di Provinsi Jambi dapat berlomba-lomba untuk meningkatkan efisiensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah untuk mensejahterakan rakyatnya dan agar perkembangan dan pertumbuhan daerahnya tidak tertinggal jauh oleh daerah lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata nilai Indeks Williamson di Provinsi Jambi selama periode 2001-2016 adalah 0,392743 yang artinya terjadi ketidakmerataan yang tinggi. Secara simultan DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. secara bersama-sama DAU, DAK, dan DBH mampu menjelaskan ketimpangan sebesar 80,00%, sedangkan sisanya sebesar 20,00% dijelaskan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan adalah DBH sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan.

Saran

Dengan melihat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jambi dapat diharapkan ada campur tangan atau kebijakan pemerintah untuk mengembangkan kualitas dan produktifitas baik SDM maupun SDA sehingga pembangunan lebih adil dan merata. Pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan produktifitas sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia antara lain dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan, disamping itu pemerintah daerah juga perlu menertibkan dokumen kepemilikan lahan khususnya bagi para petani.

Pemerintah provinsi perlu mengupayakan pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Selatan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan sesuai dengan koridornya masing-masing agar pengaruhnya dapat benar-benar mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah yang terjadi dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisetiawan, R. (2012). Analisis pengaruh kinerja keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba. *Jurnal aplikasi manajemen*.10(3).
- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan pembangunan daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Amir, A. (2007). *Perekonomian Indonesia (dalam perspektif makro)*. Biografi: Bogor.

- Amir, A. (2007). *Pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam era globalisasi (teori, masalah dan kebijakan)*. Biografi: Bogor.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Doni, M & Rokhedi, P.S. (2013). Analisis perubahan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Indonesia 2006-2011. *Journal of Economics and Policy*. 6: 103-213.
- Elly, R. (2016). Analisis spasial pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. FE-UNEJ: Jember.
- Elmi, B. (2002). *Keuangan pemerintah daerah otonom di Indonesia*. UI: Jakarta.
- Eva, B. (2013). Analisis kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. *Skripsi*. UNHAS: Makasar.
- Harianto, D & Hari. (2007). Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan per kapita. *SNA 10 Unhas Makasar*
- Jhingan, M.L. (2008). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Masrida, Z. (2011). Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan terhadap ketimpangan ekonomi regional di Provinsi Jambi. *Tesis*. Program Pasca Sarjana UNAN: Padang.
- Mirah, M. (2015). Dana perimbangan dan alokasi belanja modal serta implikasinya terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin: Makasar.
- Ni, Putu, Valentiana, Shanty, Putri; & I, Ketut, Suardhika, Natha. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *Jurnal*. Universitas Udayana: Bali.
- Nurhayani, Hodijah, S., Bhakti, A., (2015). Analisis disparitas pembangunan ekonomi dan hubungannya dengan investasi di Provinsi Jambi tahun 2002-2014. 10(2). 302 - 311
- Priyatno, D. (2010). *Paham analisa statistik data dengan SPSS*. MediaKom: Yogyakarta.
- Rama, N; Khairul, M; & Wima, Y.P. (2013). Analisis ketimpangan pembangunan (studi di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1 (4) : 110-119.
- Riduwan, & Kuncoro, A.E. (2013). *Cara mudah menggunakan dan memaknai Path Analysis (analisis jalur)*. Alfabeta: Bandung.
- Robinson, T. (2007). *Ekonomi regional : teori dan aplikasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Rosmeli. (2015). Dampak investasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan kawasan timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 10(2). 362 - 369
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional teori dan aplikasi*. Baduose: Padang.
- Tan, S. (2014). *Perencanaan pembangunan : teori dan implementasi pada pembangunan daerah*. FE-UNJA: Jambi.
- Todaro, M.,P. (2006). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Erlangga: Jakarta.
- Umiyati, E. (2012). Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Dalam Implementasi Otonomi Daerah di Propinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 1(5). 15 - 21
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Ekonisia: Yogyakarta.